

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Tuntutan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi (P3D) ke daerah dalam jumlah besar. Sementara, sejauh ini dana perimbangan yang merupakan transfer keuangan oleh pusat kepada daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah, meskipun jumlahnya relatif memadai yakni sekurang-kurangnya 25% dari Penerimaan Dalam Negeri dalam APBN, namun daerah harus lebih kreatif dalam meningkatkan PADnya untuk meningkatkan akuntabilitas dan keleluasaan dalam pembelanjaan APBDnya. Sumber-sumber penerimaan daerah potensial harus digali secara maksimal, namun tentu saja di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang memang telah sejak lama menjadi unsur PAD yang utama.

Otonomi daerah memberikan kewenangan yang luas kepada Pemerintah Daerah untuk memberdayakan potensi daerah. Diberikannya wewenang pada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya sendiri diharapkan dapat memajukan daerah tersebut dengan kebijakan yang efisien dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Beragam kebijakan dibuat untuk memaksimalkan pendapatan daerah guna mewujudkan kemandirian daerah dan kemajuan yang merata bagi seluruh masyarakat.

Seiring berjalannya waktu kebutuhan masyarakat semakin meningkat, hal ini mendorong pemerintah daerah untuk selalu mengupayakan peningkatan penerimaan daerah dengan cara memfokuskan pada upaya memaksimalkan PAD. Sumber-sumber PAD adalah hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah, di samping itu memperlihatkan adanya upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah. Hal ini semakin leluasa dilakukan pemerintah daerah kabupaten/kota setelah diberlakukan otonomi daerah. Sumber penerimaan lainnya yang dapat digunakan untuk membiayai belanja daerah adalah penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) serta penerimaan lainnya, dan penerimaan pinjaman daerah.

Penerimaan daerah Kabupaten Flores Timur terus mengalami peningkatan dan penurunan pendapatan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 1.113.990.136.000,- dan pada tahun 2018 naik menjadi Rp. 1.158.932.313.000,- kemudian pendapatan naik kembali pada tahun 2019 menjadi sebesar Rp. 1.174.768.790.000,-. Penerimaan pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur selama tiga tahun terakhir didominasi oleh jenis penerimaan yang bersumber dari Dana Perimbangan, Lain-Lain Pendapatan yang Sah dan PAD. Penerimaan Dana Perimbangan tahun 2019 sekitar 70% dari total pendapatan. Kontribusi terbesar dari Dana Perimbangan tahun 2019 masih pada pos Dana Alokasi Umum yaitu 77.09% dari total dana perimbangan atau 54.24% dari total penerimaan. Hal ini

menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih sangat bergantung pada dana bantuan dari pemerintah pusat untuk membiayai pembangunan di daerah. Jenis dan sumber penerimaan daerah di Kabupaten Flores Timur dapat dilihat pada tabel 1.1.

Tabel 1.1
Perkembangan Realisasi Penerimaan Pemerintah
Kabupaten Flores Timur Menurut Jenis Pendapatan Tahun
2017-2019 (ribuan rupiah)

No	Jenis Pendapatan	Tahun Anggaran		
		2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)
1.	Pendapatan Asli Daerah	74.121.511	55.640.492	61.167.155
2.	Dana Perimbangan	742.819.982	834.457.769	826.592.868
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	249.120.358	198.590.643	229.934.546
4.	Pembiayaan Daerah	47.928.284	70.243.409	57.074.221
Jumlah		1.113.990.136	1.158.932.313	1.174.768.790

Sumber: BPS, Statistik Keuangan Daerah Kabupaten Flores Timur 2019, hlm. 35

PAD merupakan salah satu sumber pendapatan yang sangat penting bagi daerah karena pendapatan tersebut seluruhnya berasal dan digali dari kekayaan yang dimiliki oleh daerah tersebut. Dalam hal ini, daerah mempunyai kewenangan penuh dalam memanfaatkan kekayaan daerah menjadi sumber pendapatan daerah sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah tersebut. Daerah yang berhasil meningkatkan PAD-nya secara nyata dan konsisten berarti bahwa daerah tersebut telah dapat memanfaatkan semua potensi yang ada di daerah secara optimal.

Tabel 1.2
Perkembangan Realisasi Penerimaan PAD Kabupaten Flores Timur
Tahun 2017-2019 (ribuan rupiah)

No	Jenis PAD	Tahun Anggaran		
		2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)
1.	Pajak Daerah	11.058.952	10.777.627	11.690.301
2.	Retribusi Daerah	17.188.351	23.869.783	25.438.900
3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan	4.892.199	4.765.361	4.909.036
4.	Lain-lain PAD Yang Sah	37.958.403	16.227.721	19.128.918
Total		74.121.511	55.640.492	61.167.155

Sumber: BPS, Statistik Keuangan Daerah Kabupaten Flores Timur 2019, hlm. 37

PAD Kabupaten Flores Timur seperti terlihat pada tabel 1.2 mengalami peningkatan dan penurunan pendapatan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. PAD Kabupaten Flores Timur tahun 2017 sebesar Rp. 74.121.511.000,- turun pada tahun 2018 menjadi sebesar Rp. 55.64.492.000,- kemudian mengalami kenaikan pendapatan menjadi Rp. 61.167.155.000,- pada tahun 2019. Bila dibandingkan dengan total pendapatan daerah di setiap rentang waktunya maka pada tahun 2017 sebesar 6.6%, pada tahun 2018 turun menjadi 4.8% dan naik lagi di tahun 2019 menjadi 5.2%. Restribusi daerah merupakan komponen penyumbang terbesar dalam PAD selama tahun 2018 dan 2019, yaitu sebesar 42.9% dan 41.6% dari total PAD. Sementara di tahun 2017 penyumbang PAD

terbesar disumbangkan dari Lain-lain PAD yang Sah yang sebesar 51.21% dari total PAD. Jumlah dan kenaikan kontribusi PAD akan sangat berperan dalam rencana peningkatan kemandirian pemerintah daerah untuk tidak selalu tergantung kepada bantuan dari Pemerintah Pusat.

Pajak merupakan iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan), yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Penghasilan pajak daerah berasal dari berbagai sumber, salah satunya adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). PKB yaitu pajak yang menyangkut urusan transportasi dan dipungut oleh pemerintah daerah atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor.¹

Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Pendapatan Wilayah Flores Timur juga merupakan instansi pemerintah yang secara langsung memberikan pelayanan administrasi kepada wajib pajak salah satunya, yaitu pembayaran PKB. Pelayanan yang dilaksanakan pada kantor SAMSAT Pendapatan Wilayah Flores Timur, seperti penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Tanda Kendaraan Bermotor (TKB) yang dikaitkan dengan pemasukan uang ke kas negara baik melalui PKB, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Keberadaan Kantor SAMSAT Pendapatan Wilayah Flores Timur saat ini merupakan salah satu bukti pemerintah dalam

¹ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009: *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Pasal 1, hlm. 4

memenuhi tanggung jawabnya dalam meningkatkan kemauan masyarakat untuk membayar pajak kendaraan mereka.

SAMSAT Pendapatan Wilayah Flores Timur suatu sistem administrasi yang dibentuk untuk memperlancar dan mempercepat pelayanan pembayaran pajak untuk masyarakat, yang kegiatannya diselenggarakan dalam satu gedung/tempat SAMSAT. Pendapatan Wilayah Flores Timur merupakan suatu sistem kerja sama secara terpadu antara POLRI, Dinas Pendapatan Provinsi, dan PT. Jasa Raharja (Persero). Sejalan dengan pertumbuhan penerimaan PKB dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun mengalami peningkatan yang cukup baik seperti terlihat dalam tabel 1.3

Tabel 1.3

Target dan Realisasi Penerimaan PKB Kabupaten Flores Timur
Tahun 2017-2019

No	Tahun	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi Penerimaan (Rp)	Persentase (%)
1.	2017	10.605.882.324	11.094.291.650	105
2.	2018	11.719.598.562	12.863.719.562	109
3.	2019	13.268.910.298	7.626.951.850	57,48

Sumber data: Balinewsnetwork.com

Data penerimaan daerah Kabupaten Flores Timur menunjukkan bahwa ketergantungan daerah pada dana perimbangan masih sangat tinggi. Tetapi, kontribusi PAD terhadap penerimaan daerah juga cenderung naik (data tabel 1.1). Sumbangan terbesar PAD adalah retribusi daerah. Aspek utama pembentuk retribusi daerah adalah Pajak dan Retribusi Kendaraan Bermotor.

Tabel 1.4
 Jumlah Kendaraan Sepeda Motor di Kabupaten Flores Timur
 Tahun 2017-2019

No	Tahun	Jumlah/Unit
1.	2017	24.435
2.	2018	26.759
3.	2019	28.980

<https://ntt.bps.go.id/indicator/17/394/1/jumlah-kendaraan-bermotor-menurut-jenis-kendaraan.html>

Gambaran kontribusi dari Retribusi Daerah tahun 2017-2019, sesungguhnya mendeskripsi potensi untuk terus ditumbuhkembangkan. Kesadaran masyarakat untuk membayar PKB terus tumbuh dari tahun ke tahun. Kecenderungan di tahun 2017-2019 terhadap penerimaan daerah dari retribusi dapat membuktikan hal tersebut. Untuk memperoleh gambaran tren dan perkembangan PAD dari jenis retribusi daerah dapat saja dari jenis retribusi daerah lainnya. Tetapi, nampaknya cukup urgen dan signifikan menunjukkan kontribusi dari PKB sebagai salah satu jenis penerimaan retribusi daerah.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik dengan adanya hal-hal tersebut. Dan alasan penulis memilih objek tersebut karena penulis melihat setiap tahunnya adanya kenaikan/perkembangan jumlah objek kendaraan bermotor di Kabupaten Flores Timur (data tabel 1.4). Dalam penelitian ini penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai fenomena tersebut. Dengan demikian penulis akan membahasnya dalam judul **KONTRIBUSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) BAGI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2020-2021.**

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Seberapa besar kontribusi PKB bagi PAD di Kabupaten Flores Timur Tahun 2020-2021 ?
2. Faktor-faktor apa, yang menjadi penghambat dan pendukung kontribusi PKB Tahun 2020-2021?

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan besarnya kontribusi PKB bagi PAD di Kabupaten Flores Timur Tahun 2020-2021
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor penghambat dan pendukung kontribusi PKB Tahun 2020-2021

4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah, maka beberapa kegunaan dan manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu:

Sebagai informasi;

1. Menambah wawasan pengetahuan dan pemahaman secara mendalam mengenai kontribusi PKB bagi PAD Kabupaten Flores Timur.
2. Bagi Dinas SAMSAT dan Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur untuk berperan aktif dalam meningkatkan PAD yang bersumber dari PKB.

Eksploratif untuk kajian-kajian dan atau studi-studi lanjutan yang terkait dalam penerimaan daerah umumnya dan PKB pada khususnya sebagai pembentuk PAD suatu daerah otonom.